

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025, sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjadi sangat strategis dan menentukan keberhasilan pembangunan di daerah, meskipun tidak semua keberhasilan pembangunan ditentukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karenanya dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ke depan lebih akomodatif, inovatif dan implementatif dalam melayani masyarakat dan pembangunan daerah.

Untuk itu segala saran untuk perbaikan Rancangan Awal Renja ini sangat diharapkan dan dihargai dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih atas bantuan seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Semoga semua bantuan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur,



Dr. Drs. ZULHAIDIR, M.Si,
NIP. 196911161994031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu 6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 19

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.. 23

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 26

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 77

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 77

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 81

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

 4.1 Rencana Program dan Kegiatan 84

BAB V PENUTUP 120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang telah diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan kewenangan sebagai daerah otonom secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi seluas luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mengisyaratkan adanya pembagian urusan antara urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur adalah masuk dalam kelompok urusan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Guna melaksanakan otonomi daerah di bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur telah dibentuk kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai fungsi sinkronisasi, bimbingan, evaluasi dan hubungan kerja antar instansi lain/organisasi dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin telah merumuskan dan menetapkan tujuan organisasi yaitu “Terwujudnya pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah, industri dan perdagangan yang efisien dan efektif yang mendukung persaingan sehat dan meningkatkan daya saing di pasar global”

Tujuan tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk perencanaan strategis yang berisikan program dan kegiatan skala prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dalam bentuk program kerja sehingga pelaksanaan visi dan misi kelembagaan dilaksanakan secara sistematis serta pencapaiannya seoptimal mungkin dapat terlaksana.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 442) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 Nomor 16) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 yaitu :

- 1) Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menentukan prioritas program dan Kegiatan tahunan yang akan dibiayai baik sekarang dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
- 2) Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan perencanaan kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Thn lalu & Capaian Renstra PD
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Program Renja SKPD
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan
	4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Bab V.	Penutup

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025.
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

NO	KODE	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan / Rincian	Pagu Anggaran				Total Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan APBD		Total Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Permasalahan	Tindak Lanjut
			Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Keuangan (Rp)	Fisik (%)				
	5		21.896.903.296				21.896.903.296	948.434.069,00	4,33				
	5.1		21.832.903.296				21.832.903.296	885.084.069,00	4,05				
	5.1.01	Belanja Pegawai	10,590,180,492.00				10,590,180,492.00	483,370,824.00	4,56	483,370,824.00	10,106,809,668.00		
	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6,043,823,270.00				6,043,823,270	291.586.586,00	4,82				
	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.127.944.016				4.127.944.016	213.451.800,00	5,17				
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.967.516.266				3.967.516.266	210.248.200,00	5,30				
	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	160.427.750				160.427.750	3.203.600,00	2,00				
	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	431.426.114				431.426.114	23.662.624,00	5,48				
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	418.855.318				418.855.318	23.662.624,00	5,65				
	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.570.796				12.570.796	0,00	0,00				

	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	445.314.450				445.314.450	8.285.000,00	1,86				
	5.1.01.01.03.00 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	298.230.450				298.230.450	8.285.000,00	2,78				
	5.1.01.01.03.00 02	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	147.084.000				147.084.000	0,00	0,00				
	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	174.095.964				174.095.964	12.480.000,00	7,17				
	5.1.01.01.04.00 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	160.439.216				160.439.216	11.940.000,00	7,44				
	5.1.01.01.04.00 02	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.656.748				13.656.748	540.000,00	3,95				
	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	140.237.230				140.237.230	6.885.000,00	4,91				
	5.1.01.01.05.00 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	134.523.018				134.523.018	6.885.000,00	5,12				
	5.1.01.01.05.00 02	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.714.212				5.714.212	0,00	0,00				
	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	282.411.780				282.411.780	13.687.380,00	4,85				
	5.1.01.01.06.00 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	272.260.590				272.260.590	13.614.960,00	5,00				
	5.1.01.01.06.00 02	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.151.190				10.151.190	72.420,00	0,71				
	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.940.106				39.940.106	491.856,00	1,23				
	5.1.01.01.07.00 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	32.218.196				32.218.196	491.856,00	1,53				
	5.1.01.01.07.00 02	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.721.910				7.721.910	0,00	0,00				
	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.258.882				5.258.882	3.223,00	0,06				
	5.1.01.01.08.00 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.046.386				5.046.386	3.190,00	0,06				
	5.1.01.01.08.00 02	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	212.496				212.496	33,00	0,02				

	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	357.013.880				357.013.880	10.590.576,00	2,97				
	5.1.01.01.09.00 01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	349.269.764				349.269.764	10.440.832,00	2,99				
	5.1.01.01.09.00 02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.744.116				7.744.116	149.744,00	1,93				
	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.324.184				11.324.184	512.279,00	4,52				
	5.1.01.01.10.00 01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.674.876				10.674.876	504.590,00	4,73				
	5.1.01.01.10.00 02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	649.308				649.308	7.689,00	1,18				
	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.489.572				28.489.572	1.536.848,00	5,39				
	5.1.01.01.11.00 01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.597.912				27.597.912	1.513.782,00	5,49				
	5.1.01.01.11.00 02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	891.660				891.660	23.066,00	2,59				
	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	367.092				367.092	0,00	0,00				
	5.1.01.01.12.00 02	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	367.092				367.092	0,00	0,00				
	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.202.077.222				4.202.077.222	191.784.238,00	4,56				
	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.202.077.222				4.202.077.222	191.784.238,00	4,56				
	5.1.01.02.01.00 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.064.112.430				4.064.112.430	188.563.531,00	4,64				
	5.1.01.02.01.00 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	137.964.792				137.964.792	3.220.707,00	2,33				
	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	344.280.000				344.280.000	0,00	0,00				

	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	321.480.000				321.480.000	0,00	0,00				
	5.1.01.03.07.00 01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	313.320.000				313.320.000	0,00	0,00				
	5.1.01.03.07.00 02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000				8.160.000	0,00	0,00				
	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	22.800.000				22.800.000	0,00	0,00				
	5.1.01.03.08.00 02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.800.000				22.800.000	0,00	0,00				
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.392.722.804				5.392.722.804	401.713.245,0 0	7,45				
	5.1.02.01	Belanja Barang	595.640.600				595.640.600	23.465.000,00	3,94				
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	595.640.600				595.640.600	23.465.000,00	3,94				
	5.1.02.01.01.00 02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.010.000				10.010.000	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.075.000				79.075.000	7.950.000,00	10,0 5				
	5.1.02.01.01.00 05	Belanja Bahan-Bahan Baku	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 13	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	143.615.800				143.615.800	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.461.800				14.461.800	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.670.000				7.670.000	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	17.196.400				17.196.400	0,00	0,00				

	5.1.02.01.01.00 30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	18.699.100				18.699.100	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	48.882.500				48.882.500	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.500.000				1.500.000	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.800.000				6.800.000	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 38	Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 39	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000				6.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 43	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.355.000				82.355.000	5.775.000,00	7,01				
	5.1.02.01.01.00 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.750.000				9.750.000	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	111.625.000				111.625.000	9.740.000,00	8,73				
	5.1.02.01.01.00 64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.000.000				4.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.01.01.00 73	Belanja Pakaian KORPRI	0				0	0,00	0,00				

	5.1.02.01.01.00 75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.000.000				34.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02	Belanja Jasa	3.218.016.204				3.218.016.204	248.348.282,0 0	7,72				
	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.931.896.976				2.931.896.976	234.248.179,0 0	7,99				
	5.1.02.02.01.00 01	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.200.000				17.200.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 07	Honorarium Rohaniwan	800.000				800.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	329.287.624				329.287.624	24.099.000,00	7,32				
	5.1.02.02.01.00 28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.750.000				3.750.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	709.789.852				709.789.852	52.214.500,00	7,36				
	5.1.02.02.01.00 31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	922.648.268				922.648.268	66.272.250,00	7,18				
	5.1.02.02.01.00 33	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.000.000				1.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 38	Belanja Jasa Tata Rias	30.000.000				30.000.000	0,00	0,00				

	5.1.02.02.01.00 47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 50	Belanja Jasa Kalibrasi	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.700.000				5.700.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000				1.500.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 60	Belanja Tagihan Air	2.418.000				2.418.000	264.500,00	10,9 4				
	5.1.02.02.01.00 61	Belanja Tagihan Listrik	763.631.232				763.631.232	84.016.190,00	11,0 0				
	5.1.02.02.01.00 62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	23.400.000				23.400.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.312.000				51.312.000	7.381.739,00	14,3 9				
	5.1.02.02.01.00 64	Belanja Paket/Pengiriman	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	51.100.000				51.100.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.01.00 73	Belanja Medical Check Up	18.360.000				18.360.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	180.219.228				180.219.228	14.100.103,00	7,82				
	5.1.02.02.02.00 05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	162.639.828				162.639.828	11.593.803,00	7,13				
	5.1.02.02.02.00 06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.818.600				7.818.600	1.114.700,00	14,2 6				
	5.1.02.02.02.00 07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.760.800				9.760.800	1.391.600,00	14,2 6				
	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	42.900.000				42.900.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.04.00 22	Belanja Sewa Electric Generating Set	0				0	0,00	0,00				

	5.1.02.02.04.00 37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.04.01 17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.02.04.01 18	Belanja Sewa Mebel	4.000.000				4.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.04.01 23	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.900.000				38.900.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000				1.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.05.00 09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000				1.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	62.000.000				62.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.12.00 01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000				12.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.02.12.00 03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000				50.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	435.730.000				435.730.000	16.809.250,00	3,86				
	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	204.110.000				204.110.000	16.809.250,00	8,24				
	5.1.02.03.02.00 35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.410.000				110.410.000	16.809.250,00	15,2 2				
	5.1.02.03.02.00 38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.050.000				29.050.000	0,00	0,00				

	5.1.02.03.02.01 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.710.000				18.710.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03.02.01 20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.03.02.01 21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.570.000				22.570.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03.02.04 05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000				10.950.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03.02.04 09	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.420.000				12.420.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	231.620.000				231.620.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03.03.00 01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	31.000.000				31.000.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03.03.00 12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pas ar	115.320.000				115.320.000	0,00	0,00				
	5.1.02.03.03.00 32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	45.000.000				45.000.000	0,00	0,00				

	5.1.02.03.03.00 36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0				0	0,00	0,00				
	5.1.02.03.03.00 63	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pagar	40.300.000				40.300.000	0,00	0,00				
	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.143.336.000				1.143.336.000	113.090.713,0 0	9,89				
	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.143.336.000				1.143.336.000	113.090.713,0 0	9,89				
	5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.023.281.000				1.023.281.000	105.950.713,0 0	10,3 5				
	5.1.02.04.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.055.000				120.055.000	7.140.000,00	5,95				
	5.1.04	Belanja Subsidi	5.600.000.000				5.600.000.000	0,00	0,00				
	5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	5.600.000.000				5.600.000.000	0,00	0,00				
	5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	5.600.000.000				5.600.000.000	0,00	0,00				
	5.1.04.01.01.00 01	Belanja Subsidi kepada BUMN	5.600.000.000				5.600.000.000	0,00	0,00				
	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000				250.000.000	0,00	0,00				
	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000				250.000.000	0,00	0,00				
	5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000				250.000.000	0,00	0,00				

	5.1.05.05.02.00 01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000				250.000.000	0,00	0,00				
	5.2	BELANJA MODAL	64.000.000				63.350.000,00						
	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.000.000				63.350.000,00						
	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0				0,00						
	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0				0,00						
	5.2.02.05.01.00 05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0				0,00						
	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0				0,00						
	5.2.02.05.02.00 04	Belanja Modal Alat Pendingin	0				0,00						
	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0				0,00						
	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0				0,00						
	5.2.02.06.01.00 04	Belanja Modal Peralatan Cetak	0				0,00						
	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	64.000.000				63.350.000,00						
	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	39.500.000				39.300.000,00						
	5.2.02.10.01.00 02	Belanja Modal Personal Computer	39.500.000				39.300.000,00						

	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.500.000				24.050.000,00						
	5.2.02.10.02.003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.500.000				24.050.000,00						
	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0				0,00						
	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0				0,00						
	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0				0,00						
	5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0				0,00						
	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0				0,00						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

1. Pengembangan sentra-sentra Industri kecil dan menengah yang mengarah pada Hilirisasi industri berorientasi pada peningkatan kualitas produk industri untuk menambah nilai ekonomis;
2. Terwujudnya sebuah kawasan industri yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur yang sesuai dengan tata ruang dan berbasis lingkungan sehingga bisa meningkatkan nilai investasi dan penanaman modal daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Penyuluhan dan Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1982 dan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
4. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor . 6 tahun 2004 Tentang Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Kepmendagri tentang Surat Keterangan Asal (SKA)/Certificate of Origin (CO);
6. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan meracik dan menjual minuman beralkohol;
7. Peningkatan kegiatan ekspor sebagai upaya pengembangan perdagangan luar negeri, diantaranya adalah:
 - Identifikasi produk potensi ekspor untuk diikutsertakan pada promosi dagang/pameran;
 - Pemberian informasi mengenai prosedur dan tata cara ekspor/impor;
 - Pemberian pelayanan administrasi dokumen ekspor/impor.;

8. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok dan barang strategis serta pengendalian inflasi daerah;
9. Promosi produk-produk industri dan perdagangan;
10. Memfasilitasi pelaku usaha ke akses permodalan dan pasar serta peningkatan alat produksi;
11. Penataan sarana-sarana perdagangan (pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan dan gudang);
12. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen;
13. Pengawasan penggunaan alat UTTP dan pendampingan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang dilaksanakan oleh petugas kemetrolagian setiap tahun;
14. Pengawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan;
15. Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
17. Pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
18. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.

Analisis Kebijakan Strategis dalam penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan meliputi:

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang Informal menjadi Formal	%	11.30%	10.57%	93.54%
2	Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang dan Jasa	Tingkat Lonjakan Harga	%	1.30%	0.024%	1.85%
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Realisasi Ekspor	\$	51,132,970.56	4,759,064.32	9.31%
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	100%	41.00%	41.00%
		Tingkat Alat UTTP Yang di Tera/tera Ulang	%	100%	41.00%	41.00%
5	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Kenaikan Status Industri Dari Kecil Menjadi Menengah	%	2.25%	1.75%	77.78%
		Persentase IKM Yang Meningkatkan Omzetnya	%	3%	2.25%	75.00%
6	Meningkatnya pendapatan anggota koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	80%	36%	45.00%
		Persentase Koperasi Sehat	%	60%	0.00%	0.00%

7	Meningkatnya Usaha Mikro yang Berdaya Saing	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah	500	1020	204%
		Jumlah usaha Mikro Yang Mengalami Kenaikan Status	Jumlah	100	8	8%
Rata-rata capaian						48.50%

2.3 Penentuan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian melalui perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan Pelaporan serta pengadministrasian di bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.

Sebagai acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan terkait langsung dengan 9 misi agenda pembangunan Nasional yakni pada misi ke 2 RPJMN yaitu Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri dan berdaya saing, yang juga selaras dengan misi ke 3 pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja yang didukung dengan program-program yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Secara umum pembangunan sektor perdagangan daerah dilaksanakan melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif, mendorong penunmbuhan dan pengembangan sektor produksi perdagangan dalam dan luar negeri guna peningkatan ekspor, penciptaan tertib usaha dan upaya perlindungan konsumen. Namun yang menjadi isu penting adalah penurunan laju pertumbuhan ekspor

nonmigas di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah khususnya tidak terlepas dari kondisi yang melanda sekarang yaitu wabah pandemic covid-19 secara global atau menyeluruh diseluruh Dunia.

Pada Sektor Industri sampai dengan tahun 2020 tetap memberikan peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah khususnya. Walaupun demikian dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan pembangunan sector industri belum begitu menggembirakan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dimana terjadi penurunan rata rata laju pertumbuhan industry Kalimantan Tengah hampir setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi pada sejumlah industry manufaktur dan pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,24 persen, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan sector industry pengolahan Nasional yang berkontraksi sebesar 2,93 persen. Capaian tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan perlambatan sebesar 105,63 persen.

Secara garis besarnya permasalahan pembangunan pada urusan Industri sehingga menyebabkan kondisi sector industri menurun disebabkan oleh :

1. Belum sepenuhnya terealisasi pembangunan perwilayahan industri baik Kawasan Industri maupun Sentra Industri berwawasan lingkungan yang akan menawarkan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kalimantan Tengah
2. belum optimalnya sistem informasi dan data industri serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini baik dari sisi ketersediaan akses internet di daerah maupun pengetahuan pelaku usaha industri yang membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengatasinya.
3. Masih banyak produk IKM yang belum memenuhi standarisasi serta masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM karena kurangnya penerapan teknologi industry pada IKM

4. Masih terpaku pada produk tertentu (setengah jadi) sehingga perlu upaya pengembangan lebih lanjut yang dibarengi dengan perluasan pangsa pasar, peningkatan inovasi, serta efisiensi proses produksi.

TABEL 2.3
ANALISIS KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Strategi	Kelemahan	Kekuatan	Peluang	Tantangan
1	Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Terbatasnya jumlah SDM /Aparatur yang mampu dan berpotensi sesuai Kebutuhan organisasi Terbatasnya jlh SDM -IKM yang mampu me Menuhi permintaan Pasar (mutu, desain, Harga dan pelayanan) Terbatasnya jlh Komoditi ekspor sebagai Sumber devisa Negara Pada umumnya hasil Industri kebutuhan pokok masyarakat masih Didatangkan dari luar Kalimantan Tengah, Sehingga pada saat tertentu dapat mempengaruhi suplay yang mengakibatkan terjadinya Fluktuasi harga Keterkaitan antara Sektor Industri dengan Sektor ekonomi lainnya yg relatif masih lemah Ekspor produk industri Didominasi oleh hanya	Legalitas organisasi berdasarkan Peraturan Nomor: 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tersedianya SDM aparatur dalam jumlah yang memadai. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti gedung kantor peralatan kantor dan mobilitas kantor. Adanya masyarakat/ usaha IKM yang perlu mendapat pembinaan dan pengembangan. Adanya potensi SDA yg belum dieksploitasi secara optimal.	Potensi sumber Daya alam yang Bervariatif yang diminati oleh Negara luar (hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, pertambangan, dll) Peluang pasar Komoditi, baik dlm Maupun luar negeri Terbukanya sarana Dan prasarana infrastruktur darat jalur Kota, kecamatan, Pedesaan dan didukung jalur lintas Trans Kalimantan Dapat berfungsi Secara optimal dan Kontinuitas barang Dan jasa serta Perdagangan antar Pulau. Terbukanya kesempatan peningkatan Kemampuan sumber Berdaya aparatur Maupun pengusaha	Komoditi ekspor masih terbatas dan industri masih bergantung pada hasil hutan Lambatnya Diversifikasi Komoditi Kayu, Rotan dan karet Serta struktur Industry masih Bersifat industri Hulu Adanya kebijakan Pemerintah melarang ekspor Bahan mentah Banyaknya produk baru beredar Dipasaran diluar Pengawasan Berkembangnya Pusat-pusat per Belanjaan, wara Laba dan pasar Modern. Terbatasnya infrastruktur penunjang kegiatan

	Beberapa cabang industri Masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah dalam sektor ekonomi. Masyarakat masih manja dengan sumber daya alam yg tersedia Sehingga kurang antusias akan perubahan Produk menjadi bernilai tinggi Sebagian besar kegiatan Usaha masih dijadikan kegiatan usaha sampingan Pengolahan industri Hulu menjadi industri Hilir masih ketergantungan dengan pihak Luar daerah Masih Lemahnya peranan usaha kecil dan menengah dalam menunjang perdagangan dalam dan luar negeri disebabkan kurangnya permodalan, manajemen usaha dan Pemasaran.		/pengrajin industri Kecil & menengah Mendorong untuk menciptakan wirausaha baru yg mempunyai prospek lebih yang dapat menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat	Industry dan Perdagangan Terbatasnya sumber daya Masyarakat(SDM) Yang berkualitas Dalam industry Dan perdagangan akan diberlakukan Komonitas Asean
--	--	--	---	--

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan pagu Indikatif yang diberikan pada rancangan awal RKPD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan anggaran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdapat kekurangan pagu anggaran, yang mana kekurangan anggaran ini akan berdampak (berimplikasi) kepada kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan khususnya target-target yang berhubungan langsung dengan Masyarakat pelaku usaha industri dan perdagangan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

TABEL 2.4
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
JUMLAH					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui Mekanisme masukan ataupun usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Nasional akan dimasukan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Tabel 2.5

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tabel : 2.5
 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANSKOP	REALISASI CAPAIAN RENTAN JANGKA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTAN JANGKA OPDTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK POKOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2024	PBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							4,171,496,826.00	21,896,903,296.00	21,896,903,296.00	17,725,406,470.00						4,653,635,850.00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4,171,496,826.00	15,485,403,896.00	15,485,403,896.00	11,313,907,070.00							4,653,635,850.00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN							4,171,496,826.00	15,485,403,896.00	15,485,403,896.00	11,313,907,070.00							4,653,635,850.00	

		MENENGAH																		
1	2.17.01	PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUP ATEN/K OTA	-				-	-	4,171,4 96,826. 00	15,202,4 77,296.0 0	15,202, 477,296 .00	302,139,0 24.00							4,473,6 35,850. 00	
	2.17.01.2 .01	Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	-				-	-	38,400, 000.00	46,475,0 00.00	46,475, 000.00	8,075,000 .00			-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an	-		45,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah				6 Dok ume n	6 Doku men	38,400, 000.00	46,475,0 00.00	46,475, 000.00	8,075,000 .00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			45,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG

													esa							AN
	2.17.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dok ume n	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dok ume n	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				0 Dok ume n	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD										ua Kcamatan, Semua Kel/Desa	UMUM		4. Tata Kelola Pemerintahan				NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kcamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2,984,423,198.00	10,252,196,170.00	10,252,196,170.00	7,267,772,972.00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		2,990,924,122.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang / bulan	336 Orang / bulan	2,978,543,198.00	10,240,786,170.00	10,240,786,170.00	7,262,242,972.00	Kab. Kota warigin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			2,984,924,122.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2,400,000.00	4,910,000.00	4,910,000.00	2,510,000.00	Kab. Kota warigin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warigin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat 2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.17.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semester an SKPD				-	0 Lapor an	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dok ume n	12 Doku men	3,480,0 00.00	6,500,00 0.00	6,500,0 00.00	3,020,000 .00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			6,000,0 00.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .03	Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA

																Masy araka t				GANG AN
	2.17.01.2 .03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD</i>				-	1 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG

													esa			araka t				AN
	2.17.01.2 .04	Administ rasi Pendapa tan Daerah Kewena ngan Perangk at Daerah	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>				-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i>				-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE

													ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	UMUM		t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t				NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaa n Retribusi Daerah</i>				-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .05	Administ rasi Kepega waian Perangk at Daerah	-				-	-	85,960, 000.00	101,900, 000.00	101,900 ,000.00	15,940,00 0.00			-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an	-		199,24 0,000.0 0	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			25,000,000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	2,580,000.00	4,880,000.00	4,880,000.00	2,300,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.17.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				32 Orang	32 Orang	83,380,000.00	97,020,000.00	97,020,000.00	13,640,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			60,000,000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2 .05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				-	100 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			114,240,000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	445,341,000.00	704,318,600.00	704,318,600.00	258,977,600.00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		431,570,000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2.17.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Pak et	4 Paket	2,240,0 00.00	48,882,5 00.00	48,882, 500.00	46,642,50 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			6,500,0 00.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				24 Pak et	24 Paket	9,267,5 00.00	29,199,1 00.00	29,199, 100.00	19,931,60 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			11,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy			40,550, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG

													esa			araka t				AN
	2.17.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				440 Pak et	440 Paket	11,450, 000.00	76,295,0 00.00	76,295, 000.00	64,845,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			15,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan				0 Dok ume n	0 Doku men	14,020, 000.00	23,400,0 00.00	23,400, 000.00	9,380,000 .00	-	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			11,520, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Mat erial yang Disediakan				38 Pak et	38 Paket	24,713, 500.00	47,631,0 00.00	47,631, 000.00	22,917,50 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an			35,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE

													ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	UMUM		4. Tata Kelol a Peme rintah an				NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				675 Lap oran	675 Lapor an	28,420, 000.00	49,150,0 00.00	49,150, 000.00	20,730,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			32,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				38 Lap oran	38 Lapor an	355,23 0,000.0 0	429,761, 000.00	429,761 ,000.00	74,531,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			280,00 0,000.0 0	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		70,000,000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	5 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			30,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	0.00	64,000,0 00.00	64,000, 000.00	64,000,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			40,000, 000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDA GANG AN

	2.17.01.2 .07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .08	Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	-				-	-	505,80 2,628.0 0	3,599,44 2,526.00	3,599,4 42,526. 00	3,093,639 ,898.00			-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an	-		636,06 1,728.0 0	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN

	2.17.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat</i>				950 Lap oran	950 Lapor an	2,550,0 00.00	2,750,00 0.00	2,750,0 00.00	200,000.0 0	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			2,550,0 00.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Lap oran	12 Lapor an	82,118, 624.00	800,177, 232.00	800,177 ,232.00	718,058,6 08.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			89,102, 400.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan</i>				-	1 Lapor an	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy			126,30 9,400.0 0	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG

												esa			araka t				AN	
	2.17.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				25 Lap oran	25 Lapor an	421,13 4,004.0 0	2,796,51 5,294.00	2,796,5 15,294. 00	2,375,381 ,290.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an			418,09 9,928.0 0	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .09	Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	-				-	-	111,57 0,000.0 0	434,145, 000.00	434,145 ,000.00	322,575,0 00.00			-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata Kelol a Peme rintah an	-		100,84 0,000.0 0	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang</i>				0 Unit	2 Unit	0.00	89,495,0 00.00	89,495, 000.00	89,495,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	4. Tata Kelol a Peme rintah an 4. Tata			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN

			Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										mata n, Sem ua Kel/D esa			Kelol a Peme rintah an				DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	90,860,000.00	127,830,000.00	127,830,000.00	36,970,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan			88,000,000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	10,560,000.00	35,570,000.00	35,570,000.00	25,010,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/				0 Unit	0 Unit	0.00	181,250,000.00	181,250,000.00	181,250,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Sem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	4. Tata Kelola Pemerintahan			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE

			Direhabilitasi										ua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM		4. Tata Kelola Pemerintahan				NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	10,150, 000.00	0.00	0.00	- 10,150,00 0.00	Kab. Kota waringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			12,840, 000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2 .09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota waringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan 4. Tata Kelola Pemerintahan			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2 .09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		

			<i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>				-	0 Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-				-	-	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00							180,000,000.00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		180,000,000.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>				0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timur, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			180,000,000.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDA GANG AN
3	2.17.03	PROGR AM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-				-	-	0.00	58,820,000.00	58,820,000.00	0.00						0.00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0.00	58,820,000.00	58,820,000.00	58,820,000.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-	0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDA GANG AN

	2.17.03.2 .01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DISTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.03.2 .01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawas an				0 Unit Usa ha	0 Unit Usaha	0.00	58,820,000.00	58,820,000.00	58,820,000.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) DANA TRANS FER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DISTR IAN DAN PERDA GANG AN
4	2.17.04	PROGR AM PENILAI AN KESEH ATAN KSP/US P KOPER ASI	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	

2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat 2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat	-		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANG AN
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat 2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANG AN
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat 2. Peng uatan		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN

													Sem ua Kel/D esa			Ekon omi Masy araka t				DAN PERDA GANG AN
5	2.17.05	PROGR AM PENDIDI KAN DAN LATIHA N PERKO PERASI AN	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
	2.17.05.2 .01	Pendidik an dan Latihan Perkoper asian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggo taan dalam Daerah Kabupat en/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.05.2 .01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahu an Perkoperas ian</i>				0 Ora ng	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN

															t					
6	2.17.06	PROGR AM PEMBE RDAYA AN DAN PERLIN DUNGA N KOPER ASI	-				-	-	0.00	50,969,3 00.00	50,969, 300.00	0.00							0.00	
	2.17.06.2 .01	Pemberd ayaan dan Perlindu ngan Koperasi yang Keanggo taannya dalam Daerah Kabupat en/Kota	-				-	-	0.00	50,969,3 00.00	50,969, 300.00	50,969,30 0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.06.2 .01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuh an Kesadaran Keluarga dalam Peningkata n Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan				0 Kelu arga	0 Kelu arga	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN

			Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												t				
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0.00	50,969,300.00	50,969,300.00	50,969,300.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-			-	-	0.00	99,575,300.00	99,575,300.00	0.00							0.00	

	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	0.00	99,575,300.00	99,575,300.00	99,575,300.00			-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat				0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																			

			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota waringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Econ omi Masy arakat 2. Peng uatan Econ omi Masy arakat			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANG AN
	2.17.07.2 .01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota waringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Econ omi Masy arakat 2. Peng uatan Econ omi Masy arakat			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANG AN
	2.17.07.2 .01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha</i>				0 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota waringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Econ omi Masy arakat 2. Peng uatan Econ omi Masy			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANG

			Mikro										esa			araka t				AN
	2.17.07.2 .01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				0 Unit Usa ha	0 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	2.17.07.2 .01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahu an Usaha Mikro dan Kewirau sa haan				0 Ora ng	0 Orang	0.00	39,575,3 00.00	39,575, 300.00	39,575,30 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
8	2.17.08	PROGR AM PENG EMBANG AN UMKM	-				-	-	0.00	73,562,0 00.00	73,562, 000.00	0.00							0.00	

	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	0.00	73,562,000.00	73,562,000.00	73,562,000.00			-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0.00	73,562,000.00	73,562,000.00	73,562,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							0.00	6,411,499,400.00	6,411,499,400.00	6,411,499,400.00							0.00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							0.00	6,134,999,400.00	6,134,999,400.00	6,134,999,400.00							0.00	

1	3.30.02	PROGR AM PERIZIN AN DAN PENDAF TARAN PERUS AHAAN	-				-	-	0.00	26,711,4 00.00	26,711, 400.00	0.00							0.00	
	3.30.02.2 .01	Penerbit an Izin Pengelol aan Pasar Rakyat, Pusat Perbelan jaan, dan Izin Usaha Toko Swalaya n	-				-	-	0.00	26,711,4 00.00	26,711, 400.00	26,711,40 0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.02.2 .01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
		Jumlah Rekomend asi Pemenuha n Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanja an, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras i Secara Elektronik				-	0 Doku men	0.00	26,711,4 00.00	26,711, 400.00	26,711,40 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN	

2	3.30.03	PROGR AM PENING KATAN SARAN A DISTRIB USI PERDA GANGA N	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
	3.30.03.2 .01	Pemban gunan dan Pengelol aan Sarana Distribusi Perdaga ngan	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.03.2 .01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagang an				-	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
3	3.30.04	PROGR AM STABIL SASI HARGA	-				-	-	0.00	5,973,28 8,000.00	5,973,2 88,000. 00	0.00							0.00	

		BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	0 Laporan	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timur, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.04.2.02	Pengend alian Harga, dan Stok Barang Kebutuh an Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupat en/Kota	-				-	-	0.00	5,963,288,000.00	5,963,288,000.00	5,963,288,000.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantaua n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi</i>				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG

			Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota										esa			araka t				AN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				-	4 Laporan	0.00	363,288,000.00	363,288,000.00	363,288,000.00	Kab. Kota waringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota				-	0 Laporan	0.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	Kab. Kota waringin Timur, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				-	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00							0.00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi	-				-	-	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00			-	2. Peng uatan Ekonomi Masyarakat	2.		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN

		Dagang bagi Produk Ekspor Unggula n yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupat en/Kota													Peng uatan Ekon omi Masy araka t					DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.05.2 .01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				-	0 Pelak u Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.05.2 .01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				-	0 Pelak u Usaha	0.00	85,000,0 00.00	85,000, 000.00	85,000,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN

5	3.30.06	PROGR AM STAND ARDISA SI DAN PERLIN DUNGA N KONSU MEN	-				-	-	0.00	50,000,0 00.00	50,000, 000.00	0.00							0.00	
	3.30.06.2 .01	Pelaksan aan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengaw asan	-				-	-	0.00	50,000,0 00.00	50,000, 000.00	50,000,00 0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.06.2 .01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkap an Ditera Ulang				-	0 Unit	0.00	30,000,0 00.00	30,000, 000.00	30,000,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.06.2 .01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		

			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				-	0 Orang	0.00	20,000,0 00.00	20,000, 000.00	20,000,00 0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
6	3.30.07	PROGR AM PENG GUNAAN DAN PEMAS ARAN PRODU K DALAM NEGERI	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
	3.30.07.2 .01	Pelaksan aan Promosi, Pemasar an dan Peningk atan Penggun aan Produk Dalam Negeri	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t	-		0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.30.07.2 .01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota</i>				-	0 UMKM	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota waringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							0.00	276,500,000.00	276,500,000.00	276,500,000.00							0.00	
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	0.00	276,500,000.00	276,500,000.00	0.00							0.00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	276,500,000.00	276,500,000.00	276,500,000.00			-	2. Penguatan Ekonomi Masyarakat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		0.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEHNAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

																t				
	3.31.02.2 .01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdaya- aan Industri dan Peran Serta Masyarakat				-	1 Doku- men	0.00	276,500, 000.00	276,500 ,000.00	276,500,0 00.00	Kab. Kota warin- gin Timu- r, Sem- ua Keca- mata- n, Sem- ua Kel/D esa	DANA TRANS- FER UMUM- DANA ALOKA- SI UMUM	-	2. Peng- uatan Ekon- omi Masy- araka- t 2. Peng- uatan Ekon- omi Masy- araka- t			0.00	DINAS KOPER- ASI USAHA KECIL DAN MENE- NGAH, PERIN- DUSTRI AN DAN PERDA- GANG- AN
2	3.31.04	PROGR- AM PENGEL- OLAAN SISTEM INFORM- ASI INDUST- RI NASION- AL	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	
	3.31.04.2 .01	Penyedi- aan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewena- ngan Kabupat	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			-	2. Peng- uatan Ekon- omi Masy- araka- t 2. Peng- uatan Ekon- omi Masy	-		0.00	DINAS KOPER- ASI USAHA KECIL DAN MENE- NGAH, PERIN- DUSTRI AN DAN PERDA- GANG

		en/Kota													araka t				AN
	3.31.04.2 .01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpul an, Pengolaha n dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	3.31.04.2 .01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																	
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui			-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG

			SIINas										esa			araka t				AN
	3.31.04.2 .01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantaua n dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaa n Industri dan Perusahaa n Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampai an Data ke SIINas				-	0 Doku men	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Kota warin gin Timu r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t 2. Peng uatan Ekon omi Masy araka t			0.00	DINAS KOPER ASI USAHA KECIL DAN MENE NGAH, PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN
	J U M L A H								4,171,4 96,826. 00	21,896,9 03,296.0 0	21,896, 903,296 .00	809,626,8 82,076.00							4,653,6 35,850. 00	

Bab. III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh *stakeholders* untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Selain itu, faktor permasalahan dalam pelayanan institusi dalam pengembangan industri dan perdagangan belum sepenuhnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang mengarah langsung terhadap kantong-kantong industri yang ada di daerah pedesaan serta embrio pasar sebagai pusat perbelanjaan masyarakat, hal ini kedepan merupakan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Prioritas pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya Kawasan Timur Indonesia berdasarkan Renstra Kementerian/ Lembaga sebagai berikut :

a. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI telah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024. Visi Pembangunan Perdagangan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Kondisi umum dalam dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional antara lain kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting ditandai dengan munculnya keunggulan ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran dalam pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja, terciptanya intensitas koordinasi antar fasilitator pusat dan daerah dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar dan pembinaan sektor informal.

Dengan berbagai permasalahan, maka dalam arah kebijakan perdagangan Indonesia diharapkan :

- 1) Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
- 2) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- 3) Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

- 4) Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- 5) Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Sedangkan arah kebijakan nasional di sektor perdagangan yang diprioritaskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor.

Peningkatan Penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik.

b. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian sebagai kementerian yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dengan Misi :

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan industri saat ini bukan hanya merupakan suatu potensi yang hanya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi harus mampu memberikan kontribusi yang besar ke arah modernisasi kehidupan masyarakat dalam menunjang pembentukan daya saing nasional. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka menengah bukan hanya sekedar untuk mengatasi permasalahan pokok dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh:

- 1). Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponennya.
- 2). Keterkaitan antara sektor industri dan dengan sektor ekonomi lainnya yang relatif masih lemah.
- 3). Struktur industri yang hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek.
- 4). Ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri.
- 5). Lebih dari 60 % kegiatan sektor industri terletak di Pulau Jawa.
- 6). Masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian, tetapi juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional yang meliputi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya sektor infrastruktur, tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dimana pembangunan industri untuk kedepannya, pemerintah telah menyusun kebijakan pembangunan industri nasional yang komprehensif dan disepakati seluruh potensi bangsa agar segera dapat mewujudkan terbangunnya industri nasional yang tangguh dan maju dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Dalam kebijakan tersebut diperlukan dalam pembangunan industri secara terintegritas dan sinergi diantara pemangku kepentingan utamanya pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dalam pembangunan daya saing, membangun

kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kompetensi inti daerah disektor industri antara lain melalui pembangunan kawasan industri serta membangun potensi inti tersebut berdasarkan keunggulan komparatif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pembangunan sektor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas ;
2. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan ;
3. Tumbuhnya industri rumah tangga, industri kecil dan menengah di daerah ;
4. Tumbuhnya ekonomi masyarakat lebih dinamis ;
5. Meningkatkan pelayanan perijinan / non perijinan industri dan perdagangan ;
6. Menjaga dan mengendalikan harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok ;
7. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan besar maupun eceran terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ;
8. Mengembangkan sarana distribusi dan perdagangan khususnya bahan pokok dan barang strategis lain ;
9. Menyiapkan masyarakat pelaku usaha dalam perdagangan bebas ASEAN.

sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan dan kualitas serta profesionalisme sumber daya aparatur
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum ;
- c. Meningkatnya fasilitasi informasi perdagangan dan kepemilikan izin serta meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan ;
- d. Meningkatnya keamanan konsumen atas barang dan jasa yang beredar ;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah ;
- f. Terciptanya Industri Kecil Menengah dan Industri Rumah Tangga yang maju dan mandiri serta kompetitif ;
- g. Mewujudkan optimalisasi potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari komponen PAD yakni retribusi daerah dan lain – lain PAD yang sah ;
- h. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Misi 3 Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, serta peningkatan kelembagaan sektor perdagangan	Meningkatnya Kelembagaan Perdagangan	Persentase Pedagang informal menjadi formal	10,00 %	10,00 %	11,00 %	11,30 %	11,30 %	11,30 %
2	Menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan pengamanan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat	Meningkatnya Tertib Usaha perdagangan dan stabilitas harga barang dan jasa	Tingkat lonjakan harga	1,00%	1,25%	1,25%	1,30%	1,30%	1,30%
3	Mendorong ekspor non migas Kab. Kotim	Meningkatnya nilai ekspor	Realisasi Ekspor	\$ 51.132.970,56	\$ 51.132.970,56	\$ 51.132.970,56	\$ 51.132.970,56	\$ 51.132.970,56	\$ 51.132.970,56
4	Menurunkan peredaran barang dan jasa yang merugikan konsumen serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam penggunaan alat UTTP dengan benar	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat alat UTTP yang ditera/tera ulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	Menjadikan pengusaha dan masyarakat yang terampil dalam pengolahan barang industri berbasis agro	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,25%	2,50%
			Persentase IKM yang meningkat omzetnya	2,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%	3,50%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang direncanakan untuk periode Tahun 2024 Meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- e. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- h. Program Pengembangan UMKM
- i. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- j. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- k. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- l. Program Pengembangan Ekspor
- m. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- n. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- o. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- p. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Adapun program-program tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyiapan Bahan Verifikasi
- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi Umum

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan baran Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubeler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- Pengadaan Pakaian KORPRI
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

1. Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin Usaha Toko Swalayan
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik
 - Fasilitasi pemenuhan Komitmen pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri
4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) terintegrasi secara elektronik Luar Negeri
 - Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri

5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan ppenjual langsung Minuman di tempat
 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
6. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ditingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2(P-B2)
7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten Kota/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi penerbit Surat Keterangan Asal)
 - Koordinasi dan Singkronisasi Layanan Penerbitan SKA

c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diwilayah Kerjanya
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola sarana Distribusi Perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

4. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

5. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
- Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

d. Program Pengembangan Ekspor

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kab/Kota
- Pameran Dagang Nasional
- Pameran Dagang Lokal
- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
- Peningkatan Citra Produk Ekspor
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- Penyidikan Metrologi Legal

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

g. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Peyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
- Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian data ke SIINas

Pada RKPD tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 16 program dengan 109 kegiatan. Lokasi kegiatan tersebar di Kecamatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Ibukota Provinsi, serta Ibukota Negara Indonesia. Total pagu indikatif anggaran keseluruhan tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp 21.896.903.296,- (*DUA PULUH SATU MILIYAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS TIGA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH*),

sedangkan Analisis Kebutuhan Dana untuk pelaksanaan Program Kegiatan sebesar Rp. 16.654.672.225,- (*ENAM BELAS MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU DUA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH RUPIAH*).

Sumber dana yang digunakan pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana table (4.1) berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2023

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					URUSAN PILIHAN				13.631.530.550			100 %	16.654.672.225
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.137.000.000			100 %	5.405.500.000
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin		100%	20.000.000			100 %	115.000.000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin Usaha Toko Swalayan		100%	20.000.000			100 %	25.000.000

3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Ijin	Disperdagin	100 %	20.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	25.000.000
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang			0			100 %	15.000.000
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Tanda Daftar Gudang			0			100 %	15.000.000
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	30.000.000
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Waralaba yang terdaftar	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	Jumlah Pelaku Usaha Waralaba yang terdaftar			0			100 %	15.000.000

					Dalam Negeri								
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Prosentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	30.000.000
3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Waralaba yang terdaftar	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Waralaba yang terdaftar			0			100 %	15.000.000
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol			0	APBD Kab/Kota		100 %	0

						Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Pedagang Minuman ber alkohol yang memiliki izin	17 Kecamatan	100 %	0	APBD Kab/Kota		100 %	25.000.000
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	65.000.000
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terkendalnya stok bahan berbahaya			0			100 %	25.000.000
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	terlaksananya koordinasi dlm rangka pemeriksaan bahan berbahaya			0			100 %	15.000.000

3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terkendalinya distribusi bahan berbahaya terhadap konsumen dan produsen	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	25.000.000
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Di Ibukota Provinsi		0	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	Di Ibukota Kabupaten dan Provinsi		0	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Perdagangan (Pasar/ Tradisional) yang terbangun	Di Ibukota Kabupaten	100%	750.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	3.530.000.000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Kecamatan	100%	750.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	3.500.000.000

3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar di Kab. Kotim	17 Kecamatan	100 %	750.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	3.475.000.000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana perdagangan yg mendapat fasilitas			0			100 %	25.000.000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prsentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			-			100 %	30.000.000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang mendapat layanan kebersihan, Keamanan dan Ketertiban	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan Pasar yang mandiri	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	04			PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Strategis yang stabil di 17 Kecamatan	17 Kecamatan	100%	610.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	590.000.000

3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	27.500.000			100 %	45.000.000
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Angka Inflasi daerah terkendali		100%	12.500.000			100 %	15.000.000
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Angka Inflasi daerah terkendali	17 Kecamatan	100%	15.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Angka Inflasi daerah terkendali			0			100 %	15.000.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar		100%	572.500.000			100 %	490.000.000

						Kabupaten/Kota							
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya harga Barang Kebutuhan Pokok		100 %	12.500.000			100 %	25.000.000
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terkendalinya harga Barang Kebutuhan Pokok	17 Kecamatan	100 %	10.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya harga Barang Kebutuhan Pokok	17 Kecamatan	100 %	550.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	450.000.000
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17 Kecamatan	100%	10.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	55.000.000
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah kebutuhan barang pokok dan barang strategis yang stabil di 17 Kec.	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	25.000.000

3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kebutuhan barang pokok dan barang strategis yang stabil di 17 Kec.	17 Kecamatan		0	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kebutuhan barang pokok dan barang strategis yang stabil di 17 Kec.	17 Kecamatan	100%	10.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	15.000.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Realisasi ekspor netto non migas		100%	2.680.000.000			100 %	875.500.000
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggara n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	2.680.000.000			100 %	875.500.000
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha yg dibina	17 Kecamatan	100 %	65.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	45.000.000

3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah Tingkat Nasional	17 Kecamatan	100 %	200.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	260.000.000
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah Tingkat Lokal	17 Kecamatan	100 %	2.350.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	215.500.000
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Unggulan	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah			0			100 %	265.000.000
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Mutu Produk Unggulan Daerah			0			100 %	25.000.000
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yg dibina		100%	65.000.000			100 %	65.000.000
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah alat UTTP yang telah ditera/tera ulang di 17 Kec.		100%	65.000.000			100 %	170.000.000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Prosentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		100%	65.000.000			100 %	170.000.000
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbangan yg di Tera		100 %	45.000.000			100 %	125.000.000

3	30	06	2.01	02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha yg tertib Ukur		100%	20.000.000			100 %	45.000.000
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, Takar, yg di Sidik			0			100 %	0
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya prosentase produk yang menggunakan tanda SNI		100%	12.000.000			100 %	125.000.000
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prosentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	12.000.000			100 %	125.000.000
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi produk dalam negeri		100 %	12.000.000			100 %	65.000.000
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran dan Peningkatan produk dalam negeri			0			100 %	25.000.000

3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan jaringan informasi yang ditingkatkan			0			100 %	35.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			100%	110.000.000			100 %	365.000.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Wilayah dan Akses Industri yang berkembang di Kab. Kotim		100%	70.000.000			100 %	190.000.000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		100%	70.000.000			100 %	190.000.000
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Industri Kabupaten	17 Kecamatan		-	APBD Kab/Kota		100 %	25.000.000
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersedianya Kawasan Industri Kabupaten	17 Kecamatan		-	APBD Kab/Kota		100 %	30.000.000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tersedianya Pelaku Usaha Industri			-			100 %	25.000.000

3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianya Sarana dan prasarana Industri			-			100 %	20.000.000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah SDM IKM yang di berdayakan		100 %	70.000.000			100 %	75.000.000
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri yang terbangun			-			100 %	15.000.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			100%	10.000.000			100 %	40.000.000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Prosentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah		100%	10.000.000			100 %	40.000.000
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah (IUI) yang diterbitkan			-			100 %	15.000.000
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di	Jumlah (IUI) yang		100%	10.000.000			100 %	25.000.000

					Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	diterbitkan							
3	31	04			PROGRAM PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data IKM yang akurat dan up to date		100%	30.000.000			100 %	135.000.000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk informasi untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Penyediaan Informasi Industri untuk informasi untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		100%	30.000.000			100 %	135.000.000
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data IKM yang akurat dan up to date		100%	10.000.000			100 %	45.000.000
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Data IKM yang terpublikasi		100%	10.000.000			100 %	45.000.000
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Data IKM yang akurat dan up to date		100%	10.000.000			100 %	45.000.000

					Penyampaian Data ke SIINas								
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD ; Nilai LAKIP Perangkat Daerah ; Tingkat Pemenuhan Komponen Penunjang Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan			9.384.530.550			100 %	10.884.172.225
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	10.000.000			100 %	15.000.000
x	xx	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag	100 %	2.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	2.500.000

x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Disperindag	100 %	2.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	2.500.000
x	xx	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	2.500.000
x	xx	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	3.000.000
x	xx	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100 %	4.500.000			100 %	1.500.000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag	100 %	1.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan	Prosentase Administrasi Keuangan	Disperindag	100%	4.784.777.580	APBD Kab/Kota		100 %	4.790.726.079
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg terpenuhi Gaji dan Tunjangan	Disperindag	100 %	4.778.777.580	APBD Kab/Kota		100 %	4.778.726.079
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Khusus/ Ahli/ tertentu	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	2.500.000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah dokumen yg	Disperindag			APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000

					Keuangan SKPD	diverifikasi			-				
x	xx	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen jurnal Akuntansi	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yg di sampaikan	Disperindag	100 %	3.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	2.000.000
x	xx	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Disperindag	100 %	2.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan Analisis prognosis Realaisasi Anggaran			-			100 %	1.500.000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperindag	100%	34.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	271.500.000

x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD SKPD	Disperindag	100 %	1.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset Perangkat Daerah yg diamankan	Disperindag	100 %	15.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	200.000.000
x	xx	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Disperindag			APBD Kab/Kota		100 %	
x	xx	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pencatatan BMD pada SKPD	Disperindag	100 %	15.000.000	APBD Kab/Kota		100 %	65.000.000
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan laporan BMD SKPD	Disperindag	100 %	1.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	2.500.000
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD SKPD	Disperindag	100 %	1.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	2.500.000
x	xx	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventarisasi 5	Disperindag			APBD Kab/Kota		100 %	

						(lima) tahunan							
x	xx	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Disperindag	100%	17.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	95.500.000
x	xx	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah SKPD	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Retribusi Daerah SKPD	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	1.500.000
x	xx	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah SKPD	Disperindag		-	APBD Kab/Kota		100 %	25.000.000
x	xx	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Ibukta Provinsi dan Ibukota Negara	100 %	7.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	45.000.000

						Daerah SKPD							
x	xx	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah SKPD			-	APBD Kab/Kota		100 %	7.500.000
x	xx	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Disperindag	100 %	7.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	12.500.000
x	xx	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah SKPD	Disperindag	100 %	2.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	2.500.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperindag	100%	102.500.000	APBD Kab/Kota		100 %	220.000.000
x	xx	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Disperindag			APBD Kab/Kota		100 %	
x	xx	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Disperindag			APBD Kab/Kota		100 %	

x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Disperindag		-	APBD Kab/Kota	100 %	2.500.000
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Informasi data Pegawai yang tersedia						
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Disperindag	100 %	2.500.000	APBD Kab/Kota	100 %	7.500.000
x	xx	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yg dipulangkan	Disperindag			APBD Kab/Kota	100 %	
x	xx	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang dipulangkan	Disperindag			APBD Kab/Kota	100 %	
x	xx	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang dipindahkan	Disperindag			APBD Kab/Kota	100 %	
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelatihan	Disperindag	100 %	25.000.000	APBD Kab/Kota	100 %	85.000.000
x	xx	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Peraturan yang di sosialisasikan	Disperindag			APBD Kab/Kota	100 %	

x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis		100 %	75.000.000			100 %	125.000.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	822.400.000			100 %	967.000.000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik yang tersedia		100 %	60.000.000			100 %	195.500.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia		100 %	25.000.000				
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia							
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan Bahan Logistik kantor yang tersedia		100 %	10.000.000				

x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		100 %	35.000.000			100 %	35.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan yang tersedia		100 %	22.500.000			100 %	27.500.000
x	xx	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pengadaan Bahan/ Material yang tersedia							
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan Tamu yang dapat Fasilitas		100 %	18.000.000			100 %	22.500.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana		100 %	651.900.000			100 %	635.000.000
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip yang ditata			-			100 %	6.500.000

x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Elektronik yg tersedia			-			100 %	45.000.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasekebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	40.000.000			100 %	577.950.000
x	xx	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia							
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Operasional yang tersedia							
x	xx	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan Alat Besar yg tersedia							

x	xx	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yg tersedia							
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Meubelair yang tersedia							
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100 %	40.000.000			100 %	12.500.000
x	xx	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaaan Aset Tetap Lainnya			-			100 %	65.450.000
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan Aset Tak Berwujud							
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya							
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			-			100 %	350.000.000

x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor			-			100 %	150.000.000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.053.352.970			100 %	3.363.421.146
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yg dipenuhi		100 %	12.500.000			100 %	15.750.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yg dibayar		100 %	566.344.250			100 %	565.344.250
x	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg dipelihara			-			100 %	54.500.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %	2.474.508.720			100 %	2.727.826.896
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100%	519.500.000			100 %	583.075.000

						Pemerintahan Daerah							
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yg dipelihara		100 %	135.000.000			100 %	26.500.000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajak dan perijinannya		100 %	60.000.000			100 %	65.575.000
x	xx	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yg dipelihara							
x	xx	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan tak ber motor yang dipelihara							
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara							
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilppelihara		100 %	24.500.000			100 %	24.500.000

x	xx	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yg dipelihara			-			100 %	15.750.000
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara							
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yg dipelihara /rehabilitasi		100 %	200.000.000			100 %	450.750.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yg dipelihara /rehabilitasi			-				
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /rehabilitasi							

x	xx	01	2.09	12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah		Jumlah luas Tanah yg di Pelihara/Rehabilitasi		100 %	100.000.000				

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 ini disusun merupakan lanjutan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 – 2026 sebagaimana Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu **“Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”**. Sedangkan upaya untuk mendukung Visi tersebut diatas, dijabarkan dalam Misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari; 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia; 3. Mengembangkan Industri Pengolahan; 4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur; 5. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman; 6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial; 7. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa; 8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi; 9. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman; 10. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana; 11. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; 12. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Misi ini yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menggerakkan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan yang berbasis sumber daya lokal.

Dalam rangka upaya mendukung Visi dan Misi tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tujuan yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”**. Dengan visi ini diharapkan mampu menggerakkan dunia usaha untuk lebih maju dan mandiri.

Sampit, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



Dr. Drs. ZULHAIDIR, M.Si.

NIP. 196911161994031006